

ABSTRAK

Implementasi program Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penanggulangan kenakalan remaja melalui Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak merupakan upaya pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menekan perilaku menyimpang remaja serta membentuk kembali karakter dan akhlak yang sesuai dengan norma sosial dan nilai keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program tersebut serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan kondisi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan cukup baik dalam memberikan pembinaan moral dan akhlak kepada remaja, namun belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya, khususnya anggaran dan sarana prasarana, serta koordinasi antarinstansi yang masih perlu ditingkatkan. Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak berperan penting sebagai sarana pembinaan rehabilitatif bagi remaja agar mampu memperbaiki perilaku dan kembali berfungsi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Satpol PP, Wilayatul Hisbah, Kenakalan Remaja, Rehabilitasi Moral dan Akhlak.

ABSTRACT

The implementation of the program by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and Wilayatul Hisbah (WH) in addressing juvenile delinquency through the Moral and Ethical Rehabilitation Center represents an effort by the Lhokseumawe City Government to reduce deviant behavior among adolescents and to rebuild moral and ethical values in accordance with social and religious norms. This study aims to analyze the implementation of the program and to identify the obstacles encountered during its execution. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observation, and documentation. The analysis was based on the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, which includes policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, implementers' attitudes, inter-organizational communication, and social conditions. The findings indicate that the program implementation has generally been carried out fairly well in providing moral and ethical guidance to adolescents, although it has not yet been fully optimal. The main obstacles include limited resources, particularly in terms of budget and facilities, as well as insufficient coordination among relevant institutions. The Moral and Ethical Rehabilitation Center plays a crucial role as a rehabilitative facility in guiding adolescents to improve their behavior and reintegrate positively into society.

Keywords: *Implementation, Civil Service Police Unit, Wilayatul Hisbah, juvenile delinquency, moral and ethical rehabilitation.*